

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Tuntutan terhadap peningkatan pelayanan publik yang baik dan memuaskan kepada masyarakat menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Pemerintah harus dapat mengubah pelayanan publik yang buruk menjadi lebih baik. Semakin majunya perkembangan zaman yang syarat dengan pemanfaatan teknologi informasi seharusnya dapat menjadi solusi dalam masalah pelayanan publik yang ada. Hasil penangkaran hewan langka di Indonesia telah banyak dilakukan oleh orang yang memiliki hobi atau keinginan tersendiri untuk mempunyai atau mengoleksi hewan langka. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia telah mengatur tata cara pengambilan atau penangkapan tumbuhan dan satwa liar dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar. Termasuk di dalamnya prosedur untuk mendapatkan izin mengambil, menangkap, penangkaran, peredaran, ekspor maupun impor tumbuhan dan satwa liar.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Resort Pati Barat merupakan sebuah instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang pelayanan surat izin hasil penangkaran hewan langka, salah satunya yaitu penangkaran jenis burung yang dilindungi. Berdasarkan ketentuan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSD) Resort Pati Barat bagi masyarakat yang ingin memelihara burung hasil penangkaran harus mendapatkan surat izin hasil penangkaran dari BKSDA. Namun pada kenyataannya untuk mengurus surat izin hasil penangkaran tersebut, masyarakat pati dan sekitarnya kesulitan dalam mengurus surat izin tersebut karena prosedur yang panjang dan waktu yang lama dalam proses pelayanan surat izin juga menjadi permasalahan publik yang sering terjadi. Pelayanan surat izin burung hasil penangkaran pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Resort Pati Barat yang diberikan kepada masyarakat juga dinilai belum efektif dan efisien. Untuk dapat mengakses pelayanan, masyarakat harus datang ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Resort Pati Barat. Hal ini tentunya membuat pelayanan membutuhkan waktu yang lama dan tentunya biaya yang

besar. Dengan pelayanan yang masih mengandalkan tatap muka ini juga menjadikan masyarakat harus datang ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Resort Pati Barat lebih dari satu kali ketika syarat dan prosedur belum lengkap.

Berdasarkan permasalahan tersebut pelayanan publik berbasis teknologi informasi perlu diterapkan untuk mengurangi resiko terjadinya diskriminasi dalam memberikan pelayanan, ketidakpastian mengenai waktu ataupun biaya pelayanan dan tentunya mengurangi pungutan liar yang sering terjadi. Proses Pelayanan Perizinan Hewan Langka Pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSD) Resort Pati Barat berbasis web ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan surat izin hasil penangkaran burung yang dilindungi pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSD) Resort Pati Barat menjadi lebih cepat, transparan sehingga pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diambil rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana menerapkan teknologi informasi dalam pelayanan publik pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSD) Resort Pati Barat.
2. Bagaimana membangun dan merancang suatu sistem untuk mengurus surat izin hasil penangkaran hewan langka berbasis web.
3. Bagaimana meningkatkan pelayanan perizinan burung hasil penangkaran pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSD) Resort Pati Barat yang berbasis web.

## **1.3 Batasan Masalah**

Untuk membatasi permasalahan di atas, maka cakupan masalah akan dibatasi, yaitu:

1. Hanya mencakup pelayanan surat izin hasil penangkaran burung yang dilindungi.

2. Jenis burung yang dimaksud merupakan yang didapatkan dari penangkaran, yaitu: jalak, murai batu, cucak rowo, merak, cendrawasih, elang, anis bentet kecil, anis bentet sangehe dan burung madu jawa.
3. Prosedur perizinan hasil penangkaran burung yang didapat berdasarkan ketentuan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSD) Resort Pati Barat yang mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar.
4. Hanya mencakup daerah layanan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSD) Resort Pati Barat.

#### **1.4 Tujuan**

Dengan melihat permasalahan-permasalahan yang ada, adapun tujuan dari perancangan sistem ini adalah sebagai berikut:

1. Mampu menerapkan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSD) Resort Pati Barat.
2. Membantu mempermudah dan mempercepat masyarakat dalam mengurus surat izin hasil penangkaran burung.
3. Membantu pegawai Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSD) Resort Pati Barat dalam pelayanan perizinan burung yang dilindungi agar proses pelayanan perizinan yang di berikan kepada masyarakat menjadi lebih optimal.

#### **1.5 Manfaat**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian skripsi ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat pati dan sekitarnya dalam mengurus surat izin penangkaran burung pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSD) Resort Pati Barat menjadi lebih cepat, transparan sehingga pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien.